

# **TREN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI 2015 SEMESTER I**

*- Kinerja penyidikan kasus korupsi Semester I 2015 menurun -*

Indonesia Corruption Watch  
2015

# LATAR BELAKANG

- Kasus korupsi yang disidik oleh Institusi Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) belum sepenuhnya maksimal
- Kasus korupsi yang ditangani oleh aph harus dipantau agar proses penyidikan berjalan hingga proses penuntutan

# TUJUAN

- Memetakan kasus korupsi yang disidik oleh aparat penegak hukum meliputi : kasus korupsi, kerugian negara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan, sektor korupsi, jabatan pelaku korupsi
- Menganalisis kinerja APH dalam menyidik kasus korupsi periode 2010 - 2014



# METODOLOGI

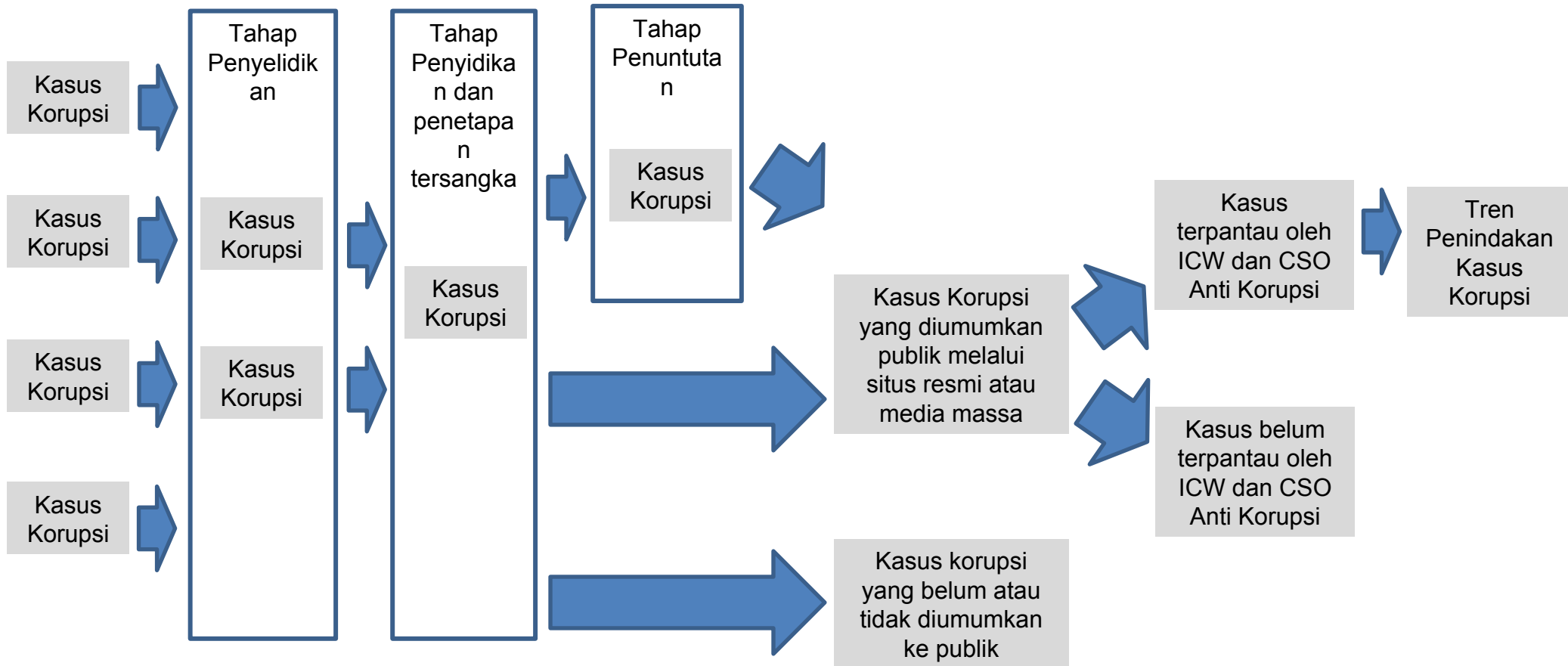
- Melakukan pemantauan kasus korupsi di tingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka.
- Kasus ini juga telah diungkap ke publik oleh penegak hukum, baik melalui website resmi atau melalui media massa
- Melakukan tabulasi atas kasus – kasus yang terungkap publik dan terpantau oleh ICW
- Membandingkan statistik jumlah kasus dan kerugian negara serta penyuapan berdasarkan tahun.
- Melakukan analisis deskriptif atas statistik kinerja penyidikan kasus korupsi.

# SUMBER DATA PEMANTAUAN KASUS KORUPSI

## Sumber Data :

- Website resmi Institusi Penegak Hukum
- Media online dan cetak
- Laporan tahunan kejaksaan 2011 – 2013
- Laporan tahunan BPKP 2010 – 2015
- Laporan hasil pemeriksaan BPK 2014 semester II

# SUMBER DATA PEMANTAUAN KASUS KORUPSI



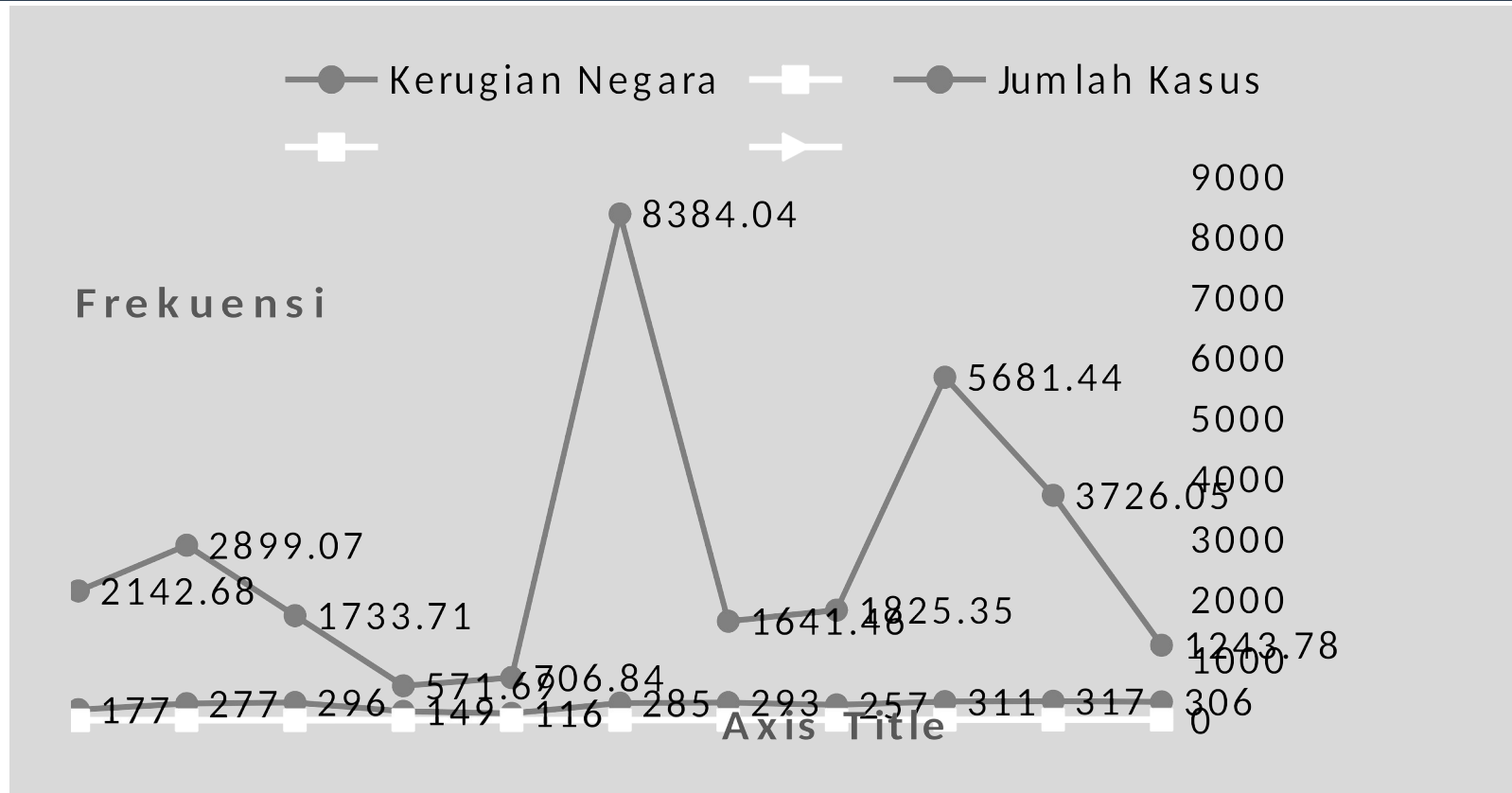
# TEMUAN

Keterangan	2015 Semester I
Jumlah Kasus	308
Jumlah Tersangka	590
Kerugian Negara	Rp 1.239,83 Triliun
Nilai Suap	Rp 457,3 miliar

Selama semester I 2015, APH berhasil menyidik 308 kasus korupsi yang melibatkan 590 orang tersangka dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1.2 triliun dan suap RP 457,3 miliar



# TREN PENYIDIKAN KORUPSI 2010 – 2015 SEMESTER I



- Rata – rata kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan per semester adalah 253 kasus. Sementara, jumlah kasus yang ditindak pada semester I 2015 adalah 308 kasus.

- Dengan demikian jumlah kinerja penyidikan kasus korupsi pada semester ini cukup baik karena berada di atas rata – rata.

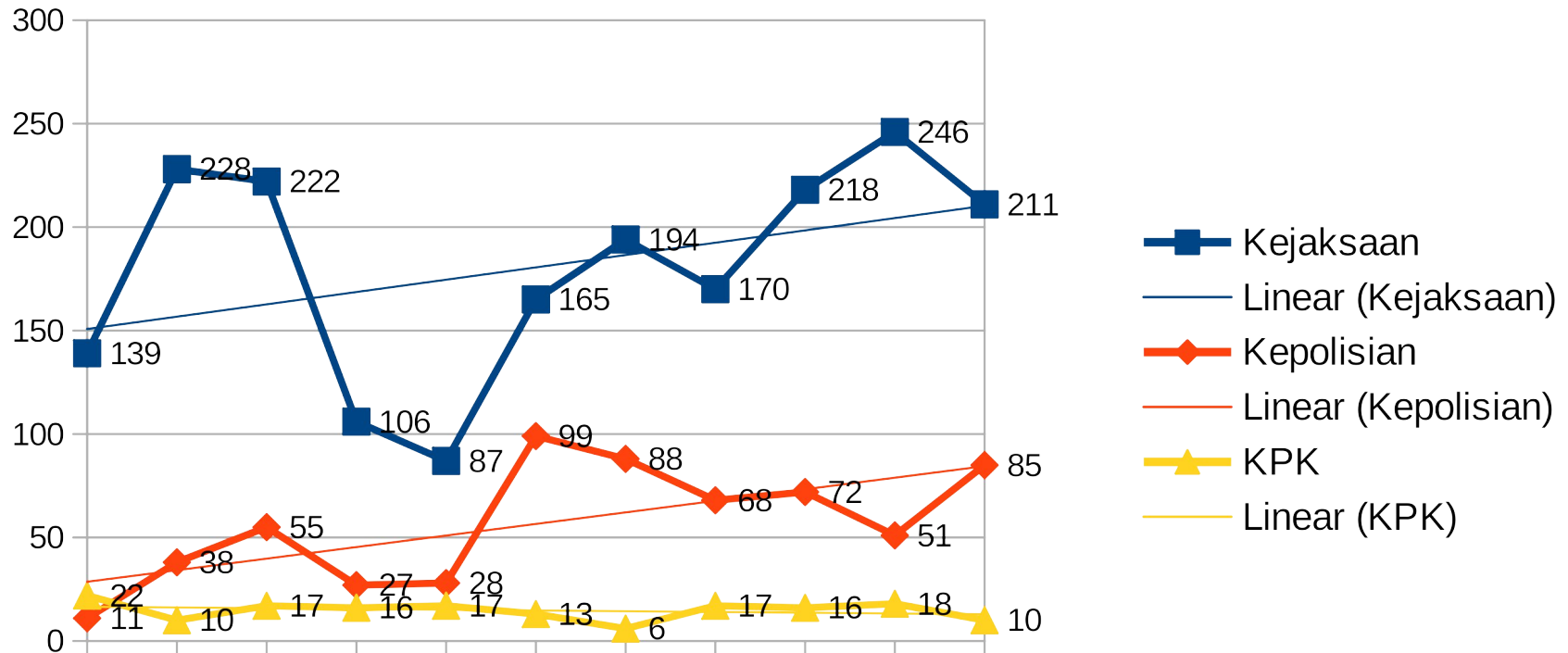
# TREN PENYIDIKAN KORUPSI 2010 – 2015 SEMESTER I (cont')

- Sementara rata – rata kerugian negara kasus korupsi per semester adalah sebesar Rp 2,7 triliun.
- Sedangkan kerugian negara dari 308 kasus korupsi pada semester I 2015 sebesar Rp 1,2 triliun.

## MENGAPA HAL INI TERJADI?

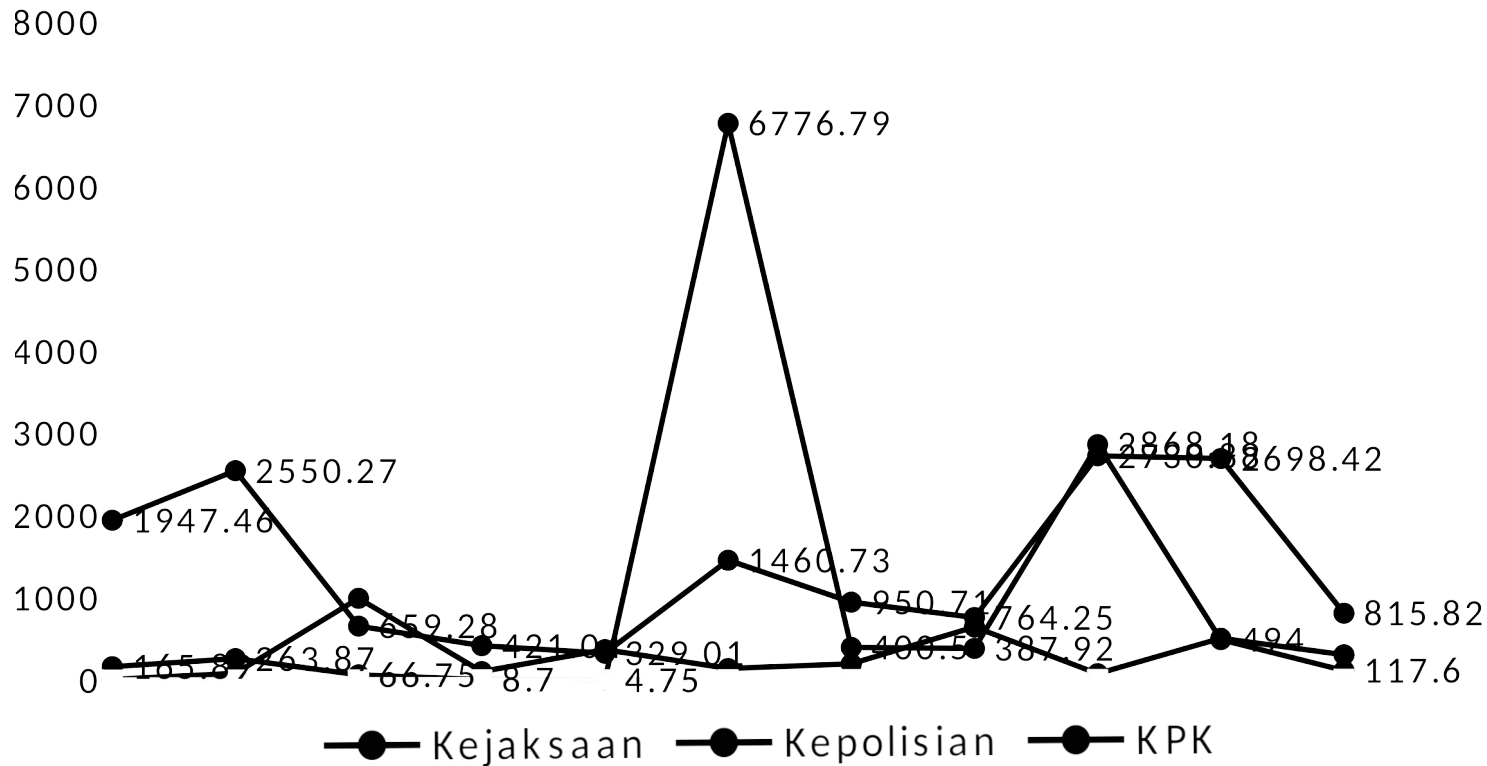
**Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat kinerja penyidikan masing – masing institusi penegak hukum**

# JUMLAH KASUS KORUPSI YANG DITANGANI OLEH PENEGAK HUKUM TAHUN 2010 – 2015 SEMESTER 1



- Menurunnya kinerja penindakan kasus korupsi terutama pada aspek kerugian negara pada semester 1 2015 disebabkan karena menurunnya kinerja penindakan KPK. KPK pada semester ini hanya menindak 11 kasus korupsi. Rata – rata kasus yang ditangani oleh KPK 15 kasus dan kerugian negara Rp 1,1 triliun

# KERUGIAN NEGARA TERKAIT KASUS KORUPSI 2010 – 2015 SEMESTER I



- Kasus yang ditangani oleh KPK berkontribusi sebanyak 30% atas total kerugian negara seluruh kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum di Indonesia.

# KERUGIAN NEGARA TERKAIT KASUS KORUPSI 2010 – 2015 SEMESTER I (cont')

- Kerugian negara yang berhasil diungkap oleh KPK pada semester I 2015 hanya sebesar Rp 106,4 miliar dan besaran suap sebesar Rp 395,1 miliar.
- Secara umum kinerja penyidikan kasus korupsi oleh APH stagnan. Namun dari sisi kerugian negara menurun. Penurunan terjadi karena menurunnya kinerja penyidikan oleh KPK.
- Jadi, jika kinerja penindakan KPK menurun maka penanganan kasus korupsi dalam aspek kerugian negara akan ikut menurun signifikan.

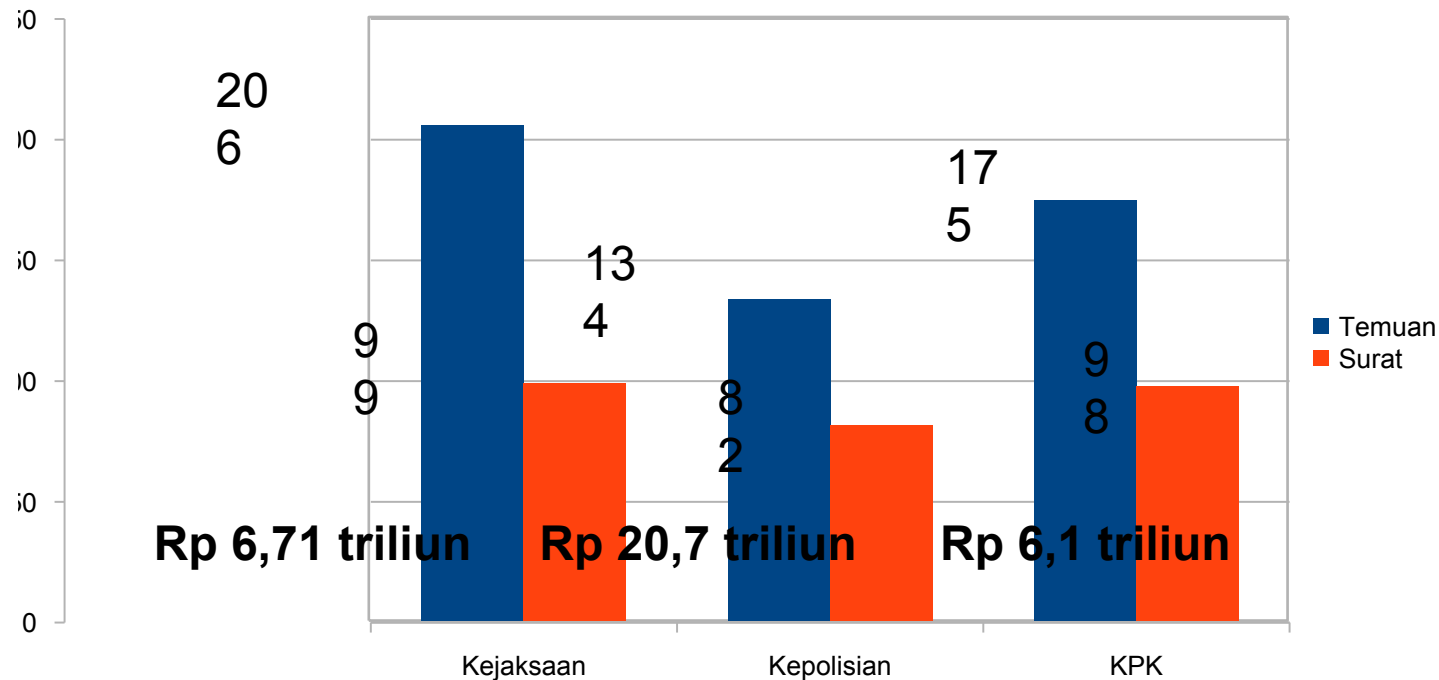
# MENGAPA KINERJA PENYIDIKAN KPK MENURUN?

4 Hal yang menyebabkan penyidikan KPK menurun :

1. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK
2. Kriminalisasi terhadap penyidik KPK (Kasus Novel Baswedan dan penyidik yang memiliki senjata api)
3. Praperadilan status tersangka perkara korupsi yang ditangani oleh KPK (kurang lebih ada 10 orang)
4. Kurangnya dukungan politik terhadap presiden dalam melindungi KPK dari kriminalisasi penegak hukum

# POTENSI KORUPSI BERDASARKAN LHP BPK

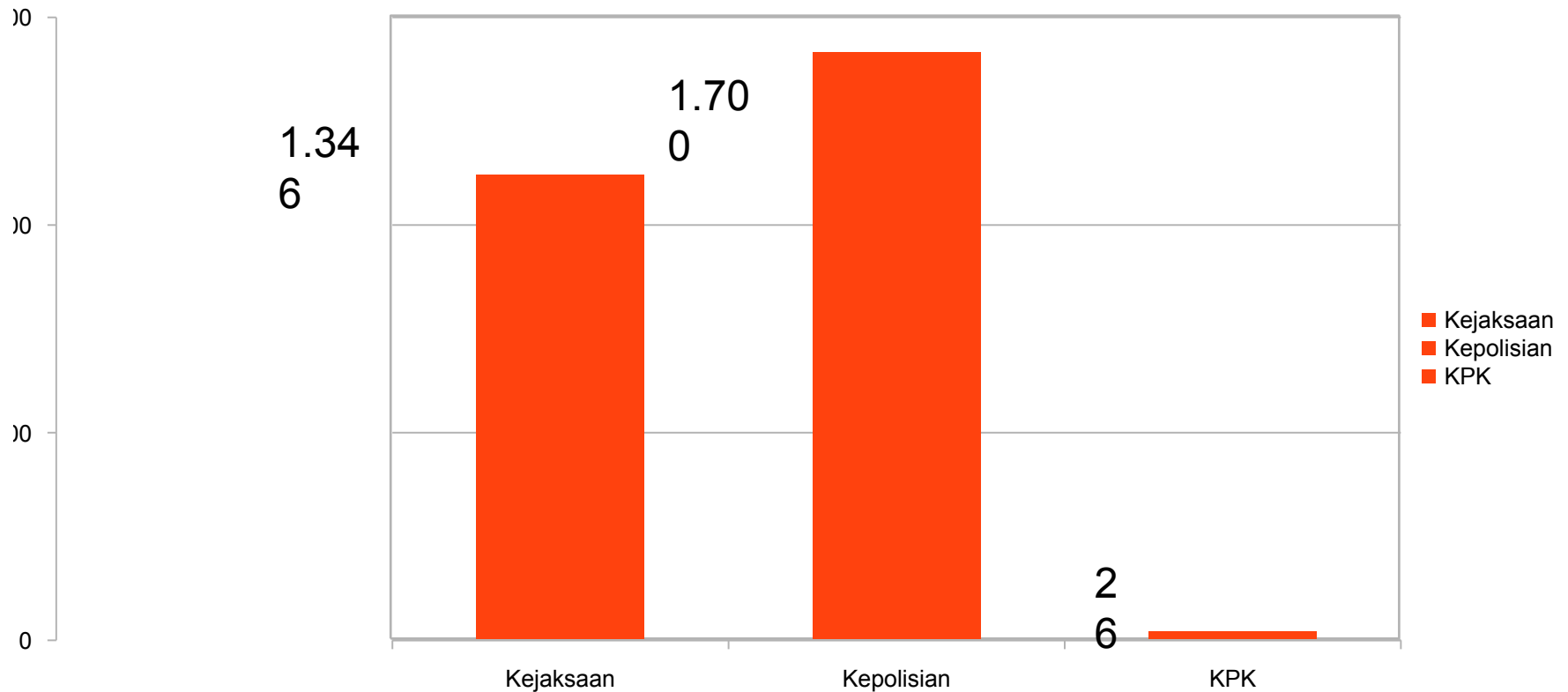
- BPK menemukan 442 temuan yang memiliki unsur tindak pidana korupsi senilai Rp 43,8 triliun dalam pemeriksaan keuangan negara pada periode 2003 – 2014.
- BPK telah menyampaikan sebanyak 227 surat pada dari total temuan





# POTENSI KORUPSI BERDASARKAN AUDIT INVESTIGATIF BPKP

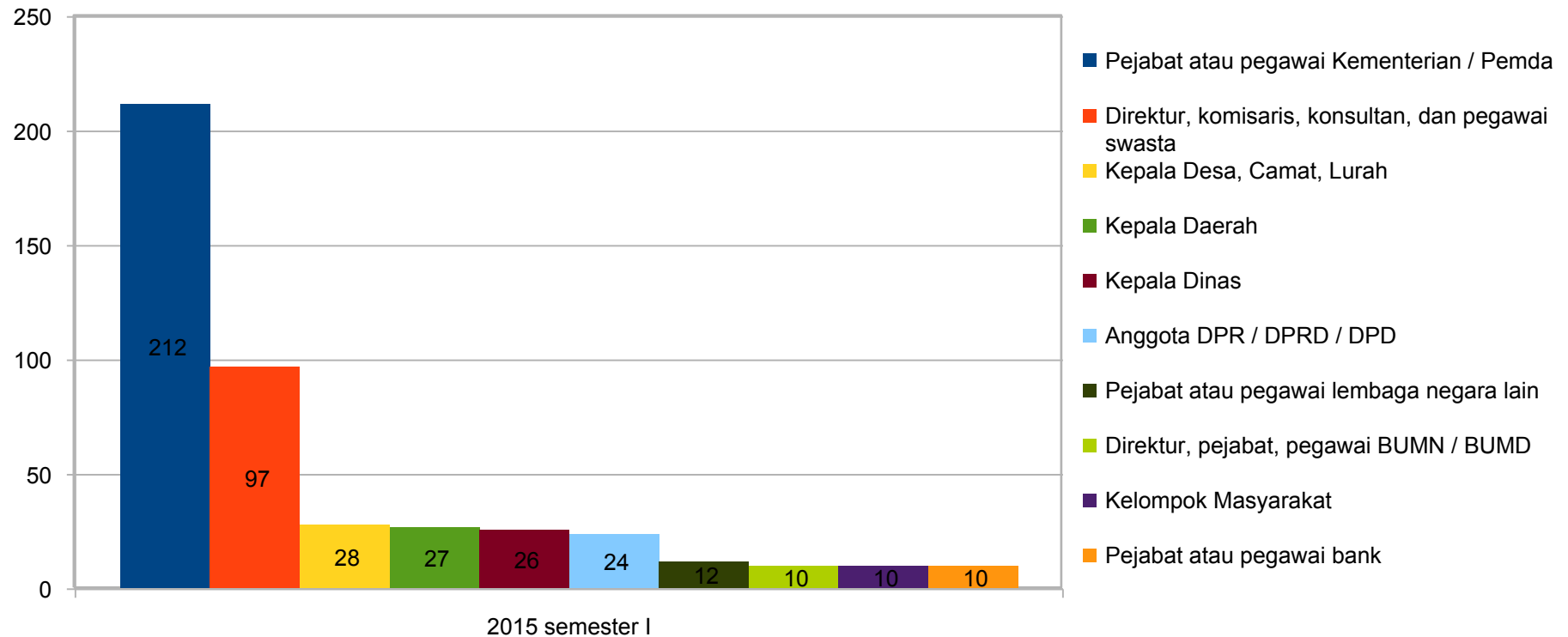
BPKP melakukan 3.072 audit investigatif dan perhitungan kerugian negara selama 2011 – 2015 semester 1 dengan nilai temuan sebesar Rp 16 triliun 43,8.



# HASIL TEMUAN ATAS POTENSI KORUPSI BERDASARKAN BPK DAN BPKP

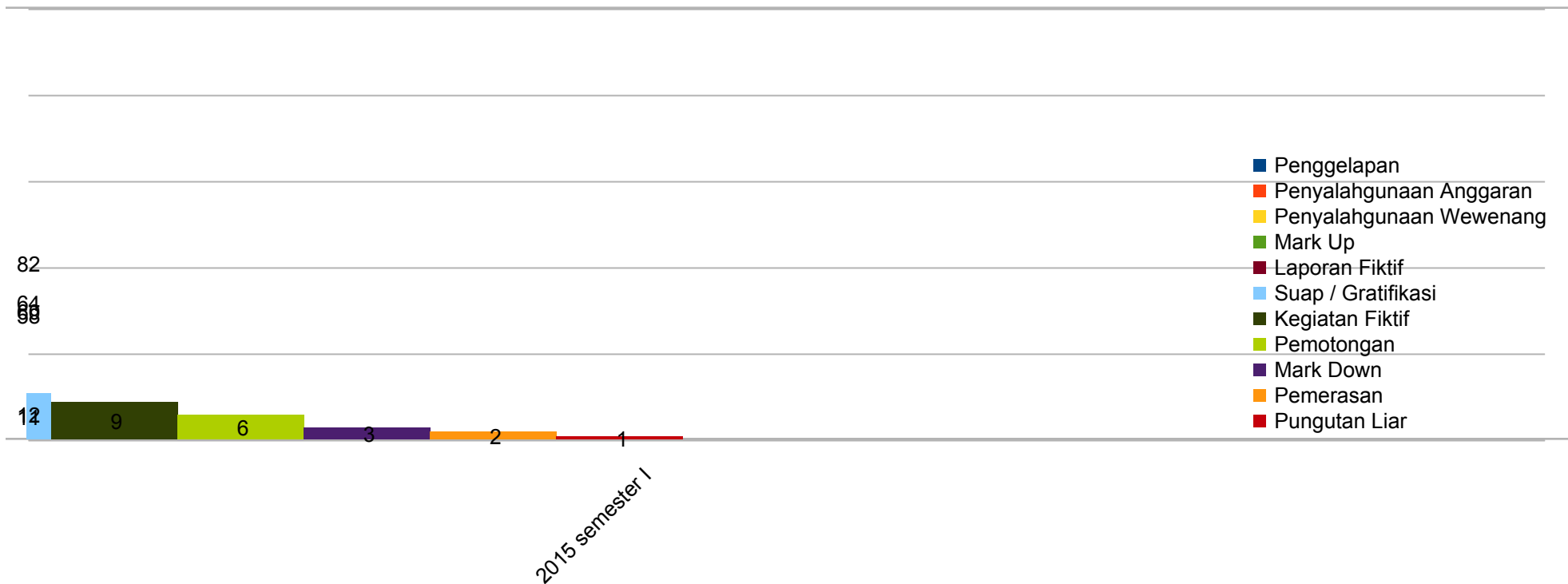
- Jika temuan BPK dan BPKP dijumlahkan dan diasumsikan tidak ada temuan yang overlap antara BPK dan BPKP maka jumlah temuan adalah sebanyak 3.514 dengan kerugian senilai Rp 59,8 triliun.
- Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian negara atas kasus korupsi yang telah masuk tahap penyidikan dalam periode 2010 sampai dengan semester I 2015.
- Kerugian negara kasus korupsi selama periode 2010 – 2015 semester I mencapai Rp 30,6 triliun.
- Dengan demikian terdapat defisit kerugian negara pada kasus korupsi yang ditindak oleh penegak hukum sebesar Rp 29,2 triliun
- Kinerja penindakan menurun sementara potensi korupsi naik.
- Artinya bahwa masih ada kasus – kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 29,2 triliun yang harusnya masuk dalam tahap penyidikan tapi belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

# 10 AKTOR YANG PALING BANYAK DITINDAK OLEH PENEGAK HUKUM TAHUN 2015 SEMESTER I



Pejabat atau pegawai kementerian / lembaga / pemda merupakan aktor yang paling banyak ditetapkan sbg tersangka oleh APH pada semester I 2015. Pola ini sama dengan tahun 2014 semester I dan II dimana pejabat pegawai pemda / kementerian merupakan aktor juga terbanyak dalam kasus korupsi.

# MODUS YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA KORUPSI KORUPSI TAHUN 2015 SEMESTER I



- Penggelapan masih menjadi modus yang masih sering digunakan oleh tersangka korupsi, yakni 82 kasus dengan kerugian negara Rp 227,3 miliar. Terbukti dari data tren korupsi ICW tahun 2014 semester 1, modus penggelapan terjadi sebanyak 99 kasus

- Artinya, modus penggelapan masih menjadi modus yang paling sering digunakan dan ditindak oleh APH.

# Kasus Korupsi berdasarkan sektor

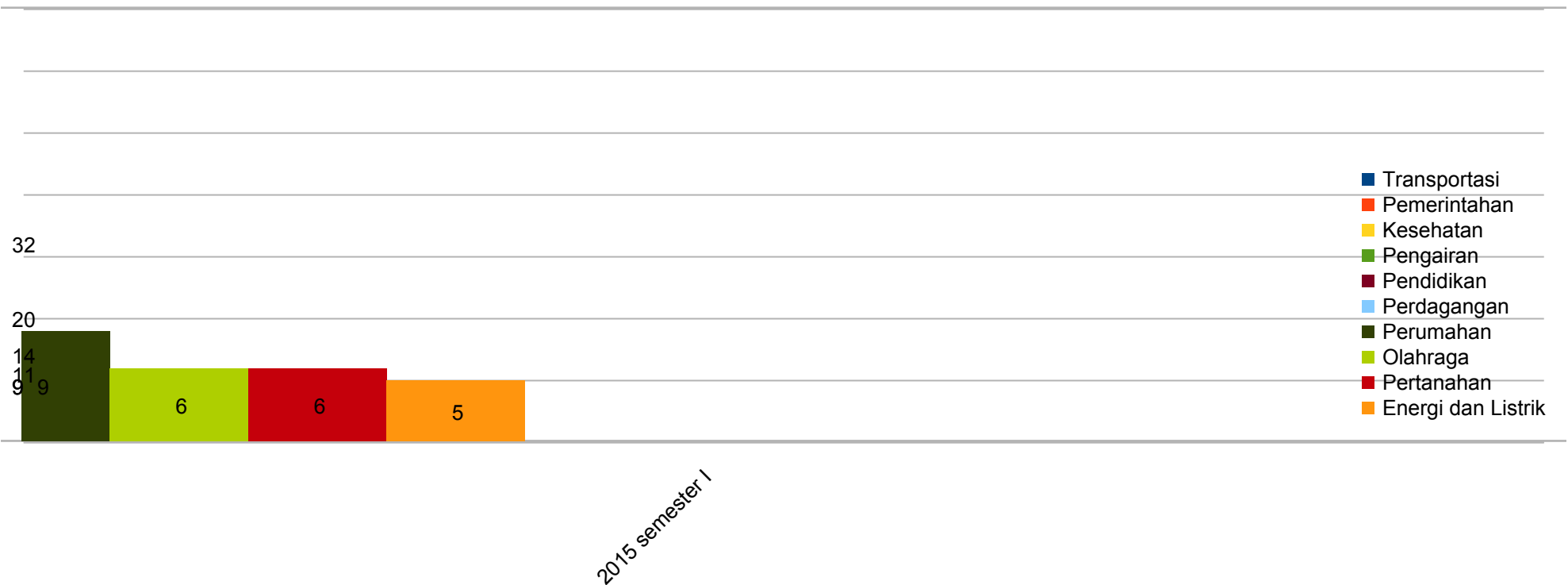
Jenis Sektor	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp Miliar)
Infrastruktur	139	411,4
Non Infrastruktur	169	821,1
Total	308	1.232,6

- Sebagian besar kasus yang disidik adalah kasus yang terkait dengan non infrastruktur sebesar 169 kasus atau 55% dari total kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 411,4 miliar.

- Sementara, kasus yang terkait dengan infrastruktur sebanyak 139 kasus atau 45% dari total kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 832,3 miliar

**INFRASTRUKTUR DI  
SEKTOR MANA YANG  
PALING BANYAK  
DITINDAK OLEH  
INSTITUSI PENECAK  
HUKUM?**

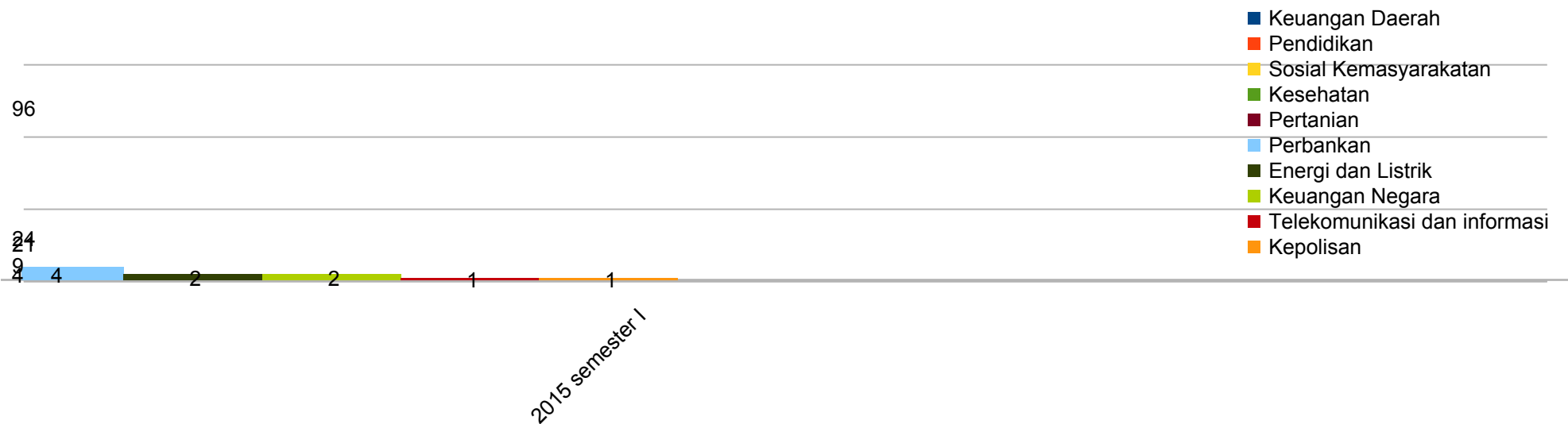
# KASUS KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR



Kasus korupsi sektor infrastruktur paling banyak terjadi

- Transportasi : 32 Kasus (nilai kerugian Rp 113,4 miliar)
- Kesehatan : 14 Kasus (nilai kerugian Rp 36,9 miliar)
- Pemerintahan : 20 Kasus (nilai kerugian Rp 33,3 miliar, nilai suap Rp 381,5 miliar)

# KASUS KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR NON INFRASTRUKTUR



Kasus korupsi sektor non infrastruktur terjadi di :

- Keuangan daerah : 96 kasus (nilai kerugian : Rp 356 miliar, nilai suap : Rp 24,6 miliar)
- Pendidikan : 24 kasus (nilai kerugian Rp 18,7 miliar, nilai suap : Rp 50 miliar)
- Sosial kemasyarakatan : 21 kasus (nilai kerugian Rp 21,1 miliar)



# 10 LOKASI / PROVINSI YANG KASUS KORUPSINYA PALING BANYAK DITANGANI OLEH PENEGAK HUKUM



- Lokasi yang paling banyak ditangani oleh penegak hukum terkait kasus korupsi, yakni :
- Sumatera Utara : 24 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 120,6 miliar dan nilai suap sebesar Rp 500 juta
  - NTT : 24 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 4,1 miliar
  - Jawa Barat : 19 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 57,1 miliar

# KINERJA PENYIDIKAN KASUS KORUPSI 2010 – 2015 SEMESTER I

Perkembangan Status	Jumlah	Persentase Kasus	Kerugian Negara (Rp triliun)
Ada Perkembangan	1.254	50,6	18,3
Belum Ada Perkembangan	1.223	49,4	11,0
Total	2.477	100,0	29,3

ICW memantau perkembangan penanganan kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan sejak semester I 2010 hingga semester I 2015

Dalam periode ini, terdapat 2.474 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan dan terpantau oleh ICW. Kerugian negara atas kasus tersebut senilai Rp 29,3 triliun

Dari kasus tersebut, 1.254 kasus atau 50,6 persen dan dengan kerugian negara sebesar 18,3 triliun naik statusnya ke penuntutan.

Di lain pihak, 1.223 kasus atau 49,4 persen dan dengan kerugian negara sebesar 11,0 triliun

# **BAGAIMANA KINERJA PENEKAK HUKUM DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI?**

# KINERJA PENYIDIKAN BERDASARKAN APARAT PENGEGAK HUKUM PERIODE 2010 – 2015 SEMESTER I

Institusi penegak hukum	Keterangan	Ada perkembangan	Belum ada perkembangan	Jumlah
Belum diketahui APH yang menangani	Jumlah Kasus	36	8	44
	Kerugian negara (Rp miliar)	164,1	43,6	207,7
Kejaksaan	Jumlah Kasus	918	857	1.775
	Kerugian negara (Rp miliar)	6.729,9	7.782,2	15.512,1
Kepolisian	Jumlah Kasus	232	304	536
	Kerugian negara (Rp miliar)	1.332	1.822,4	3.155,2
KPK	Jumlah Kasus	68	54	122
	Kerugian negara (Rp miliar)	10.042,3	1.395,0	11.437,3
Total	Jumlah Kasus	1.254	1.223	2.477
	Kerugian negara (Rp miliar)	18.269,1	11.043,2	29.312,3

# KINERJA PENYIDIKAN BERDASARKAN APARAT PENGEGAK HUKUM PERIODE 2010 – 2015 SEMESTER I (cont')

- Kepolisian memiliki kinerja penindakan tidak cukup baik, yakni kasus yang naik ke tingkat penuntutan hanya 232 kasus atau sekitar 46 persen.
- Kinerja Kejaksaan hingga semester I 2015 tidak terlalu berbeda dibanding dengan kepolisian, yakni kasus yang naik ke tingkat penuntutan sebanyak 918 kasus atau sekitar 51 persen.
- Kinerja KPK lebih baik dibandingkan dua institusi negara yang menindak kasus korupsi. Kasus yang naik ke tingkat penuntutan sebanyak 68 kasus atau sekitar 55 persen.

# 10 KEJATI YANG MENUNGGAK KASUS KORUPSI TERBANYAK

No	Kejati	Jumlah Kasus	Kerugian Negara	Kasus besar yang ditunggak oleh Kejati Jatim :
1	Jatim	64	269,1	1.Korupsi Dana Hibah P2SEM tahun 2008 2.Korupsi pembangunan proyek irigasi sekuler ketandan, Kab. Nganjuk.
2	Sulsel	56	97,1	Kasus besar yang ditunggak oleh Kejati Sulsel :
3	Sumut	51	1.286,2	
4	Jabar	46	325,5	2. Penyalahgunaan APBD di Luwu Timur tahun 2007
5	NAD	46	338,9	
6	Riau	45	1.517,2	
7	NTT	40	609,2	
8	Jambi	39	64,5	
9	Maluku	34	36,9	
10	Jateng	29	111,5	

\*Definisi penunggak kasus : APH yang belum mampu menaikkan status kasus dari penyidikan ke penuntutan

# 10 POLDA YANG MENUNGGAK KASUS KORUPSI TERBANYAK

No	Polda	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp Miliar)	Kasus besar yang ditunggak oleh Polda Sumut :
1	Sumut	30	94,6	1. Korupsi pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana pada RSUD dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga
2	Jatim	22	14,8	2. Korupsi proyek di Sei Kepayang Timur
3	NAD	21	133,6	Asahan terkait proyek peningkatan badan Jalan
4	Sulsel	18	34,3	3. Kasus pengemplangan pajak reklame di Kota Medan
5	Jateng	16	22,3	
6	Bengkulu	15	15,1	
7	Jabar	15	31,1	
8	Kaltim	11	122,4	
9	NTT	11	7,5	
10	Sulut	11	42,2	

\*Definisi penunggak kasus : APH yang belum mampu menaikkan status kasus dari penyidikan ke penuntutan

# KASUS YANG MENUNGGAK DI KEJAGUNG

1. Kasus korupsi pengadaan mobil pusat layanan internet kecamatan MPLIK pada kementerian komunikasi dan informatika.
2. Korupsi pengadaan sistem informasi Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan
3. Korupsi di PT Kertas Kraft Aceh (PT KKA)



# KASUS YANG MENUNGGAK DI BARESKRIM POLRI

1. Dugaan kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri
2. Kasus pengadaan alat pembangunan fasilitas vaksin flu burung
3. Korupsi proyek pembangunan laboratorium olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar

# KASUS YANG MENUNGGAK DI KPK (belum tuntas)

1. Kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan deputy gubernur BI Miranda Goeltom
2. Kasus Bailout Century
3. Kasus proyek KTP elektronik (*e-KTP*)

# KESIMPULAN

• Kinerja apgakum semester I 2015 cukup baik karena berada di atas rata – rata yaitu 253 kasus. Namun kerugian negara yang terungkap dibawah rata – rata yaitu Rp 2,7 triliun. Hal ini terjadi akibat kinerja KPK menurun. KPK berkontribusi sebanyak 30 persen atas total kerugian negara. Artinya bahwa jika kinerja penindakan KPK menurun maka penanganan kasus korupsi dalam aspek kerugian negara akan ikut menurun signifikan.

• Kinerja KPK menurun karena pasca penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Hal tersebut memicu terjadinya upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, penyidik KPK, gelombang praperadilan, serta dukungan politik yang kurang dari Presiden.

• Aktor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi adalah orang yang memiliki latar belakang pejabat atau pegawai kementerian / pemerintah daerah sebanyak 212 orang.

• Modus yang paling sering dilakukan dan ditindak oleh apgakum adalah penggelapan dengan 82 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 227,3 miliar.

# KESIMPULAN

• Kasus terkait dengan jenis sektoral, non infrastruktur lebih banyak, yaitu 169 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 411,4 miliar. Di non infrastruktur paling banyak terjadi pada sektor keuangan daerah sebanyak 96 kasus dengan kerugian negara sebesar 356 miliar

• Sedangkan kasus korupsi pada jenis sektor infrastruktur yaitu 139 kasus dengan total kerugian negara 832,3 miliar. Di infrastruktur paling banyak terjadi pada sektor transportasi sebanyak 32 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 113,4 miliar.

• Meskipun kasus yang termasuk infrastruktur tergolong lebih rendah dari non infrastruktur, tapi kerugian negara yang ditimbulkan hampir dua kali lipat.

• Wilayah Timur menjadi area baru bagi tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari NTT dan Papua yang masuk dalam 10 lokasi tindak pidana korupsi terbesar

• Kinerja Kepolisian dan Kejaksaan belum cukup baik. Karena dari 1.775 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan hanya mencapai 51 persen. Dan kepolisian hanya dapat menangani 536 kasus korupsi. Padahal kedua institusi tersebut memiliki kantor dari tingkat kecamatan hingga tingkat daerah.

• Tidak Polda dan Kejati, Bareskrim Mabes Polri dan Jampidsus Kejagung juga masih memiliki tunggakan kasus yang berstatus penyidikan. Kasus tersebut masih tetap berstatus sama sejak ditetapkan status penyidikan dalam periode 2010-2014.

# REKOMENDASI

• KPK perlu meningkatkan kinerja penyidikan mengingat kontribusinya terhadap kinerja penyidikan kasus korupsi secara keseluruhan. Secara internal, KPK diharapkan bisa memotivasi penyidik sehingga secara psikologis tidak lagi terganggu oleh berbagai hal yang menghambat kinerja penyidikan.

• Presiden RI wajib memberikan dukungan politik manakala pimpinan dan penyidik KPK mendapatkan serangan balik atau pelemahan dari aspek legislasi.

• Presiden RI perlu hati-hati dan cermat dalam menetapkan kebijakan perlindungan hukum bagi pejabat terkait realisasi anggaran terutama pada belanja infrastruktur mengingat kasus korupsi disektor infrastruktur juga banyak terjadi dan diusut oleh penegak hukum

• Presiden RI terutama Menkopolhukan, Kapolri dan Jaksa Agung serta KPK mampu mengkoordinasi penanganan kasus korupsi di tingkat nasional dan daerah. Hal ini bertujuan agar kinerja penyidikan kasus korupsi bisa lebih ditingkatkan sehingga Polda, Kejati beserta jajaran dibawahnya mampu menekan jumlah kasus stagnan ditingkat penyidikan.

• Revitalisasi sistem informasi penanganan kasus sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, vonis sampai putusan MA. Revitalisasi terutama ditujukan agar publik dapat mengawasi kinerja APH dan pengadilan dalam menangani kasu korupsi.